

Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia

Volume 2, Nomor 7, Oktober 2023, Halaman 43-51

Licensed by CC BY-SA 4.0

ISSN: [2986-7002](https://doi.org/10.5281/zenodo.10000711)

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10000711>

## Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berbasis Potensi Lokal Sebagai Penggerak Ekonomi Desa Pangkah Wetan Kec. Ujung Pangkah Kabupaten Gresik

Sri Umiyati<sup>1\*</sup>, Soenyono<sup>1</sup>, Edi Suhardono<sup>1</sup>, Dian Mulawarmanti<sup>1</sup>, Siswo Hadi Sumantri<sup>1</sup>, Sulistiyanto<sup>1</sup>, Arfah<sup>1</sup>, Budi Rianto<sup>1</sup>, Arie Ambarwati<sup>1</sup>, Agus Wahyudi<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Doktor Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hang Tuah Surabaya  
E-mail: [sri.umiyati@hangtuah.ac.id](mailto:sri.umiyati@hangtuah.ac.id)

### Abstrak

Program Pengabdian Masyarakat ini dilaksanakan di Desa Pangkah Wetan Kecamatan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik. Dalam konteks pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berbasis Potensi Lokal Sebagai Penggerak ekonomi Desa Pangkah Wetan Kec. Ujung Pangkah Kabupaten Gresik kemungkinan beberapa permasalahan yang muncul dengan mitra atau pihak yang terlibat adalah: 1. Minimnya Kesadaran Lingkungan: 2. Tidak Sinkronnya Tujuan: 3. Keterbatasan Anggaran: 4. Kurangnya Koordinasi: 5. Ketidaksepakatan dalam Perencanaan. 6. Keterlibatan Masyarakat yang Rendah: 7. Kendala Teknis dan Lingkungan: 8. Perubahan kebijakan: 9. Kesulitan Koordinasi dengan Komunitas Lokal: 10. Ketidakjelasan Peran dan Tanggung Jawab. Dalam mengatasi permasalahan ini, komunikasi yang baik, kolaborasi, fleksibilitas, dan komitmen bersama sangat diperlukan. Melalui dialog terbuka dan pemecahan masalah yang konstruktif, banyak hambatan dapat diatasi, dan pengembangan BUMDes yang berkelanjutan dan bermanfaat dapat terwujud.

**Kata kunci:** Bumdes, potensi lokal, pengembangan, ekonomi desa.

### Abstract

This community service program is carried out in Pangkah Wetan Village, Ujung Pangkah District, Gresik Regency. In the context of developing a Village-Owned Enterprise (Bumdes) based on local potential as an economic driver of Pangkah Wetan Village, Ujung Pangkah District, Gresik Regency, it is possible that some problems that arise with partners or parties involved are: 1. Lack of Environmental Awareness: 2. Unsynchronized goals: 3. Budget Limitations: 4. Lack of Coordination: 5. Disagreement in Planning. 6. Low Community Involvement: 7. Technical and Environmental Constraints: 8. Policy Changes: 9. Difficulty Coordinating with Local Communities: 10. Unclear Roles and Responsibilities. In addressing these issues, good communication, collaboration, flexibility and mutual commitment are essential. Through open dialogue and constructive problem solving, many obstacles can be overcome, and sustainable and beneficial BUMDes development can be realized.

**Keywords:** BUMDes, local potential, development, village economy.

---

#### Article Info

Received date: 15 Sept. 2023

Revised date: 25 Sept. 2023

Accepted date: 09 Okt. 2023

## PENDAHULUAN

Desa Pangkah Wetan di Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur dengan sebagian besar penduduknya bermata pencaharian di bidang perikanan, yaitu perikanan budidaya dan tangkap. Berdasarkan pernyataan dari Kepala Desa Pangkah Wetan; “fokus terhadap pengembangan subsektor perikanan budidaya ikan bandeng yang berbasis

pada ekspor merupakan agenda tahun 2023” (Syaifullah, 2022). Hal ini sejalan dengan tekad dari Kabupaten Gresik pada tahun 2023 yang akan mencapai produksi ikan bandeng 4 triliun (beritajatim.com, 2022). Rencana capaian produksi ikan bandeng pada tahun 2024 tersebut, karena berdasarkan data dari tahun ke tahun produksi ikan bandeng selalu meningkat signifikan. Pada tahun 2020 sebanyak 87,12 ribu ton dengan total nilai produksi sebesar Rp1,4 triliun. Pada tahun 2021, meningkat hingga 90,38 ribu ton dengan total nilai produksi mencapai Rp1,43 triliun.

Setelah desa Pangkah Wetan dicanangkannya sebagai Kampung Bandeng, bersama-sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur berkolaborasi menyediakan lahan beserta 100 ribu ekor bibit bandeng dan 2 ton pakan bandeng. Kampung perikanan budidaya bandeng Pangkah Wetan memiliki luas lahan budidaya 2.465 Ha, dengan jumlah pembudidaya sebanyak 601 RTP (2-3 tenaga kerja/RTP) dengan jumlah kelembagaan 7 Pokdakan, 1 Poklhasar dan 1 Gapokkan dengan total produksi bandeng 6900 ton, sebagaimana dalam gambar 1.



Gambar 1 Produksi Bandeng Desa Pangkah Wetan  
Sumber: Dokumen Desa Pangkah Wetan, 2022.

Analisis situasi terkait Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berbasis Potensi Lokal Sebagai Penggerak ekonomi Desa Pangkah Wetan, Kecamatan Ujungpangkah, Gresik:

a). Lingkungan dan Alam:

- a. Desa Pangkah Wetan memiliki potensi alam yang beragam, termasuk potensi lahan pertanian, vegetasi alami, dan sumber daya air.
- b. Kondisi lingkungan yang sehat dan alam yang masih lestari adalah aset penting yang bisa dijadikan dasar bagi pengembangan BUMDes berbasis potensi local sebagai penggerak ekonomi Desa.

b). Kesejahteraan Masyarakat:

- a. Kualitas hidup masyarakat dapat ditingkatkan melalui pengembangan BUMDes berbasis potensi local sebagai penggerak ekonomi Desa
- b. BUMDes juga bisa memberikan peluang ekonomi yang tujuannya adalah memaksimalkan kesejahteraan Masyarakat.

c). Partisipasi Masyarakat:

- a. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengembangan BUMDes berbasis potensi local sebagai penggerak ekonomi Desa dapat bervariasi. Sehingga perlu diatasi hambatan seperti kurangnya kesadaran atau waktu luang supaya masyarakat desa akan lebih mampu untuk bersaing dan mampu menciptakan kesejahteraannya sendiri melalui maksimalisasi BUMDes.
- b. Komunikasi yang efektif dan program edukasi dapat meningkatkan skill sumber daya manusia di desa sehingga tidak hanya berorientasi pada hasil yang ingin dicapai .

d). Keterlibatan Pemerintah Daerah:

- a. Peran pemerintah daerah sangat penting dalam mendukung pengembangan BUMDes berbasis potensi local sebagai penggerak ekonomi Desa. khususnya dalam upaya mendorong kegiatan ekonomi di desa dan kesejahteraan masyarakat desa.
- b. Kerjasama dengan pemerintah setempat untuk mendapatkan izin dan dukungan penting untuk memaksimalkan BUMDes tentu perlu disusun peraturan perundang-undangan terkait BUMDes untuk memberi kewenangan pada regulator desa dalam melaksanakan pembangunan dan inovasi desa
- e). Keterlibatan Mitra Eksternal:
  - a. Mitra Bisnis dapat membantu sumber daya, dan pendanaan shg harus menjalin Kerjasama yang baik.
  - b. Keterlibatan mitra ini dapat meningkatkan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan.
- f). Kendala Keuangan:
  - a. Keterbatasan anggaran bisa menjadi hambatan serius dalam pengembangan BUMDes. Solusi mengembangkan potensi daerah tertentu. Sehingga dapat memanfaatkan potensi ekonomi lokal untuk memproduksi barang yang unik dan berstandar global khas daerah tersebut serta skala usaha suatu desa agar dapat menciptakan produk dengan kualitas global yang khas dengan memaksimalkan sumber daya ekonomi lokal.
- g). Regulasi dan Perizinan:
  - a. Proses perizinan dan regulasi dapat memperlambat pengembangan BUMDes. Kerja sama dengan otoritas terkait dan pemahaman yang mendalam tentang peraturan setempat sangat diperlukan.
- h). Hubungan dengan Komunitas Lokal:
  - a. Memahami nilai-nilai dan aspirasi masyarakat setempat sangat penting. Keterlibatan komunitas dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan dan preferensi yang akan mempengaruhi desain dan implementasi proyek.

Dalam rangka mengatasi tantangan ini, penting untuk melakukan analisis mendalam tentang setiap aspek dan mengidentifikasi peluang yang dapat dimanfaatkan. Kerjasama antara pemerintah, masyarakat, mitra eksternal, dan semua pihak terlibat akan memainkan peran kunci dalam mengatasi hambatan dan mengembangkan BUMDes yang sukses dan berkelanjutan di Desa Pangkah Wetan.

### **Permasalahan Mitra**

Dalam konteks pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berbasis Potensi Lokal Sebagai Penggerak ekonomi Desa Pangkah Wetan Kec. Ujung Pangkah Kabupaten Gresik kemungkinan beberapa permasalahan yang mungkin muncul dengan mitra atau pihak yang terlibat adalah:

1. Minimnya Kesadaran Lingkungan: Mitra yang terlibat, baik pemerintah daerah, sektor swasta dan pelibatan masyarakat, mungkin memiliki tingkat kesadaran yang berbeda. Perlu adanya upaya untuk meningkatkan pemahaman dan komitmen mereka terhadap aspek kesejahteraan Masyarakat
2. Tidak Sinkronnya Tujuan: Mitra yang terlibat mungkin memiliki tujuan yang berbeda-beda. Pemerintah mungkin fokus pada pengembangan BUMDes, sedangkan organisasi lebih berorientasi pada keberlanjutan. Penting untuk memastikan bahwa tujuan semua pihak terintegrasi dalam rencana pengembangan BUMDes.
3. Keterbatasan Anggaran: Mitra mungkin mengalami keterbatasan anggaran untuk mendukung pengembangan BUMDes. Ini bisa menjadi kendala dalam mengimplementasikan proyek dengan baik. Perlu dilakukan perencanaan yang cermat dan eksplorasi sumber pendanaan yang beragam.

4. Kurangnya Koordinasi: Jika tidak ada koordinasi yang baik antara berbagai mitra, dapat mengalami hambatan. Koordinasi yang buruk dapat mengakibatkan tumpang tindih, pemborosan sumber daya, dan kesulitan dalam mengambil keputusan.
5. Ketidaksepakatan dalam Perencanaan: Mitra mungkin memiliki pandangan yang berbeda tentang bagaimana pengembangan BUMDes yang seharusnya dikembangkan. Perbedaan pandangan ini bisa menyebabkan konflik dan penundaan dalam proses perencanaan dan implementasi.
6. Keterlibatan Masyarakat yang Rendah: Jika mitra tidak berhasil melibatkan masyarakat secara efektif, maka partisipasi masyarakat dalam pengembangan BUMDes bisa rendah. Ini dapat mengurangi dampak positif tersebut dan membuatnya kurang berkelanjutan.
7. Kendala Teknis dan Lingkungan: Tergantung pada kondisi alam dan lingkungan, mungkin ada kendala teknis yang sulit diatasi dalam pengembangan BUMDes.
8. Perubahan Kebijakan: Kebijakan pemerintah atau regulasi yang berubah-ubah dapat memengaruhi pengembangan BUMDes.
9. Kesulitan Koordinasi dengan Komunitas Lokal: Bekerja dengan komunitas lokal dapat menghadirkan tantangan tertentu, seperti perbedaan budaya, nilai, dan harapan. Mitra perlu memahami dan menghormati nilai-nilai masyarakat setempat untuk membangun hubungan yang baik.
10. Ketidakjelasan Peran dan Tanggung Jawab: Jika peran dan tanggung jawab masing-masing mitra tidak jelas, maka pengembangan BUMDes bisa menjadi kacau. Penting untuk mendefinisikan peran setiap pihak secara jelas.

Dalam mengatasi permasalahan ini, komunikasi yang baik, kolaborasi, fleksibilitas, dan komitmen bersama sangat diperlukan. Melalui dialog terbuka dan pemecahan masalah yang konstruktif, banyak hambatan dapat diatasi, dan pengembangan BUMDes yang berkelanjutan dan bermanfaat dapat terwujud.

### **Solusi yang Ditawarkan**

Universitas sebagai lembaga pendidikan dalam upaya mendukung dan mendampingi Pengembangan BUMDes berbasis Potensi Lokal dan Partisipasi Masyarakat Sehingga sangat dibutuhkan bekerjasama dengan mitra binaan yaitu pemerintah Desa Pangkahwetan sehingga pemerintah Desa dapat optimal dalam Pengembangan BUMDes. Dari permasalahan diatas, maka Tim Pengabdian Masyarakat Prodi Magister Administrasi Publik Universitas Hang tuah memberikan beberapa solusi, yaitu:

1. Memberikan sosialisasi tentang pentingnya strategi pengembangan BUMDes sebagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam menjawab tantangan dan meraih peluang dan menghindari ancaman. Materi yang disampaikan bertema: Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) oleh Dr. Sri Umiyati, M.Si dan Dr. Arfah, M.Si selaku dosen Prodi Magister Administrasi Publik.
2. Memberikan sosialisasi tentang strategi apa untuk mengembangkan BUMDes Dengan melibatkan Masyarakat, UKM, Perangkat BUMDes, Karang Taruna sebagai kelompok sasaran untuk mengoptimalkan strategi pengembangan BUMDes diharapkan dapat Memberdayakan masyarakat melalui peningkatan kapasitas perencanaan dan pengelolaan perekonomian Desa Pangkahwetan yang disampaikan secara langsung oleh Dr. Budi Rianto, MSi dan Dr. Agus Wahyudi, M.IP selaku dosen Pendamping

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan Badan Usaha yang modalnya baik seluruh maupun sebagian dimiliki oleh desa yang dikelola untuk mensejahterakan masyarakat desa (Undang-undang No.43 Tahun 2014). Pembentukan BUMDes didasari pada Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dimana dijelaskan bahwa untuk peningkatan pendapatan masyarakat maka pemerintah desa membentuk BUMDes dengan

memanfaatkan kekayaan desa untuk dikelola dan dilihat berdasarkan kebutuhan masyarakat. BUMDes dibentuk sebagai Badan Usaha untuk meningkatkan ekonomi dan pemanfaatan potensi desa (Zulkarnaen, 2016). Adanya BUMDes sendiri dalam suatu daerah maka akan menghasilkan usaha-usaha dalam meningkatkan perekonomian dalam masyarakat tersebut untuk dapat mensejahterakan masyarakat. Pengelolaan BUMDes dilakukan berdasarkan kesepakatan masyarakat, kemauan dan kemampuan dari setiap kelompok masyarakat secara bersama, kekeluargaan dan gotong-royong. BUMDes disesuaikan dengan potensi desa yang dikelompokkan berdasarkan program usaha yang akan dibentuk dan dikembangkan, struktur organisasi, program BUMDes dibentuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

BUMDes adalah lembaga yang bergerak dibidang ekonomi serta sosial untuk melayani masyarakat terutama dibidang usaha (Ramadana dkk, 2013). Pengelolaan potensi desa yang dikelola oleh BUMDes dapat berupa potensi alam seperti pertanian, perikanan, perkebunan, simpan pinjam, pengelolaan sampah, industri rumah tangga, dan lainnya. Dan dalam pengelolaan BUMDes sendiri harus akuntabel, jujur, demokratis, transparan serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. BUMDes menjadi pilar dalam kegiatan ekonomi desa sehingga mampu meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan pendapatan asli desa dan pengelolaan potensi desa sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat desa (Valentine, 2020).

Keberadaan BUMDes sendiri memiliki suatu kontribusi yang mana dapat meningkatkan pendapatan dalam desa dan juga dapat memenuhi kebutuhan pokok desa. Selain itu peran dari BUMDes dilihat dari sumber dana yang telah dikelola untuk dapat meningkatkan pendapatan, kebutuhan sehari-hari masyarakat untuk keseluruhannya.

BUMDes sendiri sangat diperlukan oleh masyarakat untuk dapat meningkatkan pendapatan dan untuk dapat memajukan usaha-usaha masyarakat tersebut. Pendirian BUMDes ini penting dilakukan dan dilaksanakan oleh masyarakat desa yang dapat memperkuat konsep tradisi berdesa dan menempatkan desa tersebut wadah kolektif dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. Oleh karena itu, kehadiran BUMDes menjadi sebuah nilai yang sangat penting bagi masyarakat desa dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan nya (Putu, 2019).

BUMDes merupakan suatu lembaga pemerintah yang berbentuk Badan Usaha yang seluruh dana modalnya dimiliki oleh desa dan dikelola oleh masyarakat desa yang mana modal BUMDes tersebut berasal dari hasil potensi desa yang dimanfaatkan dan dikelola oleh masyarakat. Badan Usaha ini mendorong meningkatkan perekonomian dan menjadikan masyarakat sejahterah, dengan adanya Badan Usaha ini maka terciptanya produktivitas dalam sektor ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya manusia untuk mengelola potensi kekayaan dalam desa (Undang-Undang No.6 Tahun 2014).

BUMDes juga dapat didefinisikan sebagai suatu Badan Usaha milik desa secara bersama-sama pemerintah desa serta masyarakat membentuk dan mengembangkan Badan Usaha tersebut dan Badan Usaha mempunyai tugas untuk memanfaatkan seluruh potensi desa dan sumber daya manusia dalam bingkai meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat desa.

Dari penjelasan BUMDes yang tercantum dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa terlihat dalam pengamatan bahwa adanya BUMDes dalam memberikan manfaat sosial bagi kehidupan masyarakat warga desa. BUMDes merupakan suatu Badan Usaha yang dalam pengelolaan modal serta potensi dalam desa itu dilakukan sendiri oleh masyarakat dan perangkat desa dengan cara meningkatkan sektor ekonomi desa dilihat dari kebutuhan masyarakat dan potensi desa yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, dan paling utama adalah bahwa adanya BUMDes dapat menjadikan suatu lembaga Badan Usaha yang dapat menghasilkan Pendapatan Asli Desa dan penjelasan dari definisi BUMDes menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa BUMDes dibentuk dan didirikan berfungsi sebagai salah satu upaya peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa) (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004).

## METODE PELAKSANAAN

Metode Pelaksanaan pengabdian pada masyarakat dilakukan melalui aktifitas pelatihan dan pendampingan langsung kepada mitra. Metode pelaksanaan yang dilaksanakan melalui tahapan diantaranya :

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan sebagai upaya untuk mengoptimalkan Penguatan kelembagaan BUMDes dilakukan melalui kegiatan pelatihan dan pendampingan mengenai pemetaan (mapping), penilaian (assessmen) dan penentuan jenis usaha BUMDes sesuai potensi desa Pangkahwetan di Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik. Kegiatan utama dari pengabdian ini adalah melakukan pendampingan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Untuk Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa Ujung Pangkah Kabupaten Gresik Oleh karena itu, perlu diawali dengan sosialisasi untuk memberikan informasi tentang pentingnya Pengembangan BUMD untuk kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa.

Pelaksanaan pengembangan BUMDes berbasis potensi lokal dan partisipasi masyarakat di Desa Pangkah Wetan dapat dilakukan melalui serangkaian metode yang terintegrasi dan komprehensif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut adalah hasil dari pelaksanaan yang telah dilakukukan oleh tim Pengabdian masyarakat :

### 1. Studi Pendahuluan dan Survei:

- Lakukan studi pendahuluan untuk mengidentifikasi perekonomian yang ada di desa terutama infrastruktur fisik yang mendukung, dan dukungan yang positif dari warga desa juga pada sosial, kekeluargaan dan juga profesionalitas.
- Lakukan survei untuk mengumpulkan data untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

### 2. Partisipasi Masyarakat:

- Selenggarakan pertemuan desa untuk memperkenalkan konsep pengembangan BUMDes dan mendengarkan masukan dari Pengurus dan Masyarakat.
- Bentuk kelompok kerja atau komite wirausaha yang terdiri dari warga untuk ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan .



Gambar 2. Masyarakat peserta PenMas Desa Panglah Wetan



Gambar 3: Pemaparan Materi dan peserta sosialisasi

3. Perencanaan Terintegrasi:

- Libatkan tim multidisiplin yang terdiri dari kelembagaan, kebijakan, perbankan, keuangan, Sosial
- Buat rencana master yang mencakup rencana pengembangan jangka panjang.



Gambar 4: Pengembangan Industri Pengalengan

4. Pemilihan Lokasi dan Desain:

- Berdasarkan hasil survei dan partisipasi masyarakat, pilih lokasi yang sesuai untuk pengembangan Fakultas /Prodi.
- Rancang desain yang mempertimbangkan karakteristik lingkungan, kebutuhan masyarakat, dan aspek keberlanjutan.

5. Pengembangan Infrastruktur:

- Bangun infrastruktur dasar seperti akses jalan, area parkir

6. Edukasi dan Sosialisasi:

- Selenggarakan sesi edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya BUMDes, keberlanjutan, dan manfaat UKM dan masyarakat. Sosialisasi yang sudah dilakukan, antara lain :



Gambar 5. Sosialisasi pentingnya BUMDes

#### 7. Pendanaan dan Penggalangan Dana:

- Cari sumber pendanaan dari pemerintah, pelibatan Masyarakat menjadi nasabah Bank Desa

#### 8. Monitoring dan Evaluasi:

- Tetapkan indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan BUMDes, seperti dukungan kebijakan desa, partisipasi masyarakat, dan juga kemampuan pengelola.
- Lakukan pemantauan berkala dan evaluasi untuk menilai apakah pengembangan BUMDes sesuai dengan tujuan awal.

Dalam pelaksanaannya, penting untuk berfokus pada transparansi, keterlibatan masyarakat, dan keberlanjutan jangka panjang. Keterlibatan aktif semua pihak, termasuk pemerintah, mitra eksternal, dan warga desa, akan menjadi kunci kesuksesan dalam mengembangkan BUMDes yang bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat.

### KESIMPULAN

Hasil dari pelaksanaan PenMas di Desa Pangkah Wetan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik adalah :

- 1) Dalam melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat pada tahun ini bertujuan untuk memberikan informasi serta sosialisasi tentang Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Untuk Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa dapat berjalan dengan efektif sesuai dengan tujuan Kebijakan tersebut khususnya tingkat desa.
- 2) Kegiatan berupa : Sosialisasi tentang Strategi Pengembangan BUMDes, dengan sasaran : 1. Sekretaris Desa, 2. Perangkat BUMDes, 3 .Kepala Bidang ekonomi Desa, 4.Karang Taruna, 5. Beberapa tokoh masyarakat. dengan jumlah peserta 38 orang. Luaran PenMas antara lain 1. Naskah Publikasi Jurnal Internasional, 2. Video pelaksanaan Kegiatan Pengabdian masyarakat di kanal Youtube, 3.Publikasi di media massa Berita Lima.

### UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan Terima kasih kami sampaikan kepada LPPM Universitas Hang Tuah Surabaya yang telah mendanai Pelaksanaan pendanaan kegiatan PenMas tahun 2023 yang dilaksanakan di Desa Pangkah Wetan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik;

**Referensi**

- Alkadafi Muammar. (2014). Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa Menuju Asean Economic Community :2015 Jurnal El- Riyasah.
- Andini, Uly Hikma, H. Mochamad Saleh Soeaidy, dan Ainul Hayat. (2015). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dari Desa Tertinggal Menuju Desa Tidak Tertinggal (Studi Di Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati). Malang: Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya
- Bahri Gayo Syamsul, Erlina dan Rejuman. (2020). Peranan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Perdesaan. MKG Vol. 21, No.2.
- Fkun Edigus. (2019). Eksistensi Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Desa Subun Bestobe Kecamatan Insana Barat.: Jurnal Poros Politik.
- Firdaus Raudhatul. (2020). Peran Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Manding Laok Kec. Manding Kab. Sumeneb. (JIB) Jurnal Inovasi Penelitian.
- I Wayan Saputra. (2016). Efektifitas pengelolaan Alokasi Dana Desa. Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi (JJPE). Volume: 6 Nomor: 1 Tahun 2016
- Hillallatun Febriani, Rika Nurmala, I made Indra Lesmana, Ni Kadek
- Wiwik Ulantara, Desak Putu Yuliana Puspa Dewi dan Nina Rizky. (2018). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Penguat Ekonomi Desa Abiantuwung. Artikle Metrics.
- Intan Kinasih, Bambang Widiyaseno dan Ekapti Wahjuni DJ. (2020). Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes) Dalam Memperkuat Perekonomian Masyarakat.
- Junaidi, Muhammad Adib. (2018). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Penguatan Ekonomi Di Desa Kedung Turi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. Fakultas Administrasi Negara Universitas Airlangga. Jurnal Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah DiIndonesia, 2019
- Manan Wahyunadi Abdul. (2019). BUMDes Penggerak Ekonomi Desa. Jakarta: Penerbit Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi.
- Nurman, M.SI.,PH.D. (2015). Strategi Pembangunan Daerah. Leuwilinggung.: PT Rajagrafinda Persada.
- Nih Luh Putu Sri Purnama Pradnyani, (2019). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Tibubeneng Kuta Utara. Jurnal Riset Akuntansi
- Rahman Suleman Abdul, Erika Revinda. Irwan Kurniawan Soetijono, Robert Tua Siregar, Syofyan, Ahmad Fauzal, Henry Pandapotan Silitonga, Muhammad Fitri Ramadhana, Marto Silalahi dan Ahmad Syafii.2020. BUMDes Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa. Banyuwangi. :PT Yayasan Kita Menulis.